

**PERTIMBANGAN JAKSA EKSEKUTOR DALAM
PENUNDAAN EKSEKUSI MATI TERKAIT UPAYA HUKUM
LUAR BIASA DITINJAU DARI NILAI-NILAI ISLAMI
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

RIDHO BAWANA JATI

C100150084

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN JAKSA EKSEKUTOR DALAM PENUNDAAN
EKSEKUSI MATI TERKAIT UPAYA HUKUM LUAR BIASA DITINJAU
DARI NILAI-NILAI ISLAMI
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

RIDHO BAWANA JATI

C100150084

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN JAKSA EKSEKUTOR DALAM PENUNDAAN
EKSEKUSI MATI TERKAIT UPAYA HUKUM LUAR BIASA DITINJAU
DARI NILAI-NILAI ISLAMI
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR)**

OLEH

RIDHO BAWANA JATI

C100150084

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 3 Juli 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

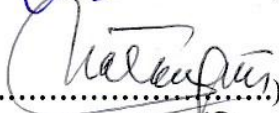
1. Hartanto, S.H., M.Hum.

(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

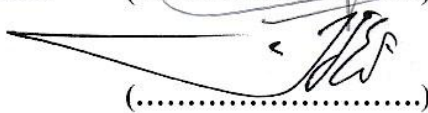
2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum

(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)


3. Muchamad Iksan, S.H., M.H.

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

Dekan




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 26 Juni 2019

Penulis



RIDHO BAWANA JATI
C100150084

**PERTIMBANGAN JAKSA EKSEKUTOR DALAM PENUNDAAN
EKSEKUSI MATI TERKAIT UPAYA HUKUM LUAR BIASA DITINJAU
DARI NILAI-NILAI ISLAMI
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR)**

Abstrak

Pertimbangan jaksa eksekutor dalam penundaan eksekusi mati terdapat dua (2) cara yaitu pertama adanya pemberian grasi dari Presiden dan kedua adanya upaya hukum luar biasa yang dinamakan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan narapidana kepada Mahkamah Agung (MA). Sedangkan menurut nilai-nilai islami pertimbangan jaksa eksekutor dalam penundaan eksekusi mati adalah harus berdasarkan syariat islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist, sehingga tidak boleh menyimpang dari keduanya.

Kata Kunci: pertimbangan jaksa eksekutor, penundaan eksekusi, islam.

Abstract

Consideration executing prosecutors in the delay of execution, there are two (2) ways: firstly the granting of pardon from the President and both their extraordinary legal remedy called Review (PK) filed by inmates to the Supreme Court (MA). Meanwhile, according to Islamic values executing prosecutors considerations in the delay of execution is to be based on Islamic Shari'a ie Qur'an and Hadith, so it should not deviate from both.

Keywords: consideration of attorney executor, delay execution, islam.

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Menurut pengertian tersebut Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Indonesia menggunakan sistem hukum Civil Law, yaitu sistem hukum yang berdasarkan hukum positif tertulis yang terkodifikasikan. Salah satu produk hukum positif tertulis yang digunakan oleh negara Indonesia hingga sekarang adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.

KUHP yang sekarang sudah tidak menggunakan dualisme tetapi sudah berlaku semua golongan tidak seperti dalam hukum perdata dan KUHP pada tahun 1918 (Moeljatno, 2002). KUHP mengatur 2 (dua) jenis pidana di dalamnya, seperti pidana pokok dan pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 10 sampai Pasal 43 KUHP. Pasal 10 KUHP menjelaskan pidana sebagai berikut : Pidana Pokok; (a). Pidana Mati, (b). Pidana Penjara, (c). Pidana Kurungan, (d) Pidana

Denda. Pidana Tambahan; (a). Pencabutan hak-hak tertentu; (b). Perampasan barang-barang tertentu; (c). Pengumuman putusan hakim.

Pidana Mati tersebut memang dibenarkan dalam KUHP seperti yang tertuang dalam pasal sebagai berikut (Soesilo, 1960): Makar dengan maksud membunuh Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 104 KUHP); Melakukan hubungan dengan negara asing yang menimbulkan perang (Pasal 111 ayat (2) KUHP); Pengkhianatan memberitahukan kepada musuh diwaktu perang (Pasal 124 ayat (3) KUHP); Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 Bis KUHP); Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat (3) KUHP); Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); Pencurian dengan kekerasan menggunakan sekutu menimbulkan luka berat dan kematian (Pasal 365 ayat (4) KUHP); Pembajakan di laut mengakibatkan mati (Pasal 444 KUHP); Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K ayat (2) dan Pasal 149 O ayat (2) KUHP).

Tidak hanya di dalam KUHP saja, tetapi ada Undang-Undang diluar KUHP yang diancam dengan pidana mati. Undang-Undang tersebut diantaranya adalah : Undang-Undang No 7/Drt/1955; Undang-Undang No35/2009; Undang-Undang No 31/2009 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No 20/2001; Undang-Undang No 39/1999; Undang-Undang No 15/2003.

Ancaman pidana mati dikenal juga dalam hukum Islam yang dikenal dengan nama Qishash. Pidana mati menurut pandangan Islam terdapat dalam Surah Al-Baqrah ayat 178-179.

Di dalam Hukum Islam itu sendiri hukum pidana mati dibedakan menjadi dua macam yaitu; pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan Sengaja yakni dimana seseorang yang dewasa, sehat akal dan pikiran adanya mengakibatkan kematian orang lain dengan sengaja. Dan diduga sengaja harus memenuhi syarat-syarat: a) pembunuhannya harus dilakukan dengan akal, baliqh (dewasa) dan tujuannya menghilangkan nyawa; b) korbannya harus terjamin jiwanya dan sanksinya harus pidana mati; c) Alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan mengakibatkan kematian (Thalib, 2000).

Pembunuhan Tidak Sengaja yakni dimana seseorang yang patut diduga melakukan pembunuhan tidak sengaja, apabila memenuhi syarat-syarat: a) tidak

bermaksud menghilangkan nyawa orang lain; b) alat yang digunakan tidak mematikan; c) terjadi diduga kematian atas perbuatan tersebut; d) sanksi pembunuhan tidak sengaja menurut pendapat R. Abdul Djamali:

Sanksi Qishashnya tidak wajib dilakukan, tetapi diwajibkan membayar diyat, pembayar diyat dengan cara memberikan kepada ahli waris dengan jumlah yang telah ditentukan, pembayarannya setiap tahun.

Pelaksanaan pertimbangan penundaan eksekusi hukuman mati pada hakikatnya terdapat dua alasan yaitu karena masih menunggu grasi presiden terhadap terpidana mati dan karena dimungkinkan adanya upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) yang diajukan ke MA oleh terpidana mati sehingga hal tersebut harus menjadi pertimbangan.

Pelaksanaan tersebut di atas dimaksudkan yang berhak melakukannya dan menyelenggarakannya adalah Kejaksaan Agung, berkedudukan di Ibukota Negara yang mencakup seluruh kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung yang merupakan pemimpin dan penanggung jawab tertinggi serta memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan tugas serta wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Apa yang menjadi pertimbangan Jaksa Eksekutor dalam melaksanakan penundaan hukum mati ? (2) Bagaimana pertimbangan Jaksa Eksekutor dalam perspektif nilai-nilai islami terhadap terpidana mati.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Jaksa eksekutor dalam melaksanakan penundaan hukuman mati. (2) Mengetahui bagaimana pertimbangan Jaksa Eksekutor dalam perspektif hukum islam terhadap terpidana mati.

Manfaat dari penelitian ini adalah (1) Manfaat Teoritis yaitu memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam memahami ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai Pertimbangan Hukum dalam Penundaan Eksekusi Hukuman Mati terhadap Terpidana Mati ditinjau dari nilai-nilai Hukum Islam (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Karanganyar). (2) Manfaat Praktis yaitu (a) Memberikan sumbangan informasi kepada masyarakat dalam wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana (b) Memberikan masukan

kepada Jaksa Eksekutor dalam mempertimbangkan pelaksanaan penundaan Eksekusi Mati terhadap Terpidana Mati terkait upaya hukum luar biasa ditinjau dari nilai-nilai Hukum Islam.

Kerangka dari penelitian ini yaitu istilah “Tindak Pidana” menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang berlaku, dimana ada ancaman pidana (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi seseorang (barangsiapa) ada yang melanggar aturan hukum tersebut. Secara ringkas “Tindak Pidana” ini adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku serta diancam dengan pidana. Menurut Moeljatno, larangan itu berupa perbuatan, maksud dari perbuatan ini adalah keadaan atau kejadian dimana ditimbulkan oleh orang, sedangkan ancaman pidanya bertujuan untuk memberikan ancaman pidana kepada orang yang menimbulkan tindak pidana itu. Penegakan hukum disini adalah Pengadilan, Kejaksaan serta Kepolisian. Tetapi sebelumnya suatu perkara tersebut harus melalui proses penyidikan, penuntutan serta sidang pengadilan yang dilakukan penegakan hukum tersebut. Semua itu harus berdasarkan ketentuan dari KUHP dan KUHP.

Secara khusus penelitian ini membahas tentang ancaman pidana mati yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, jika seseorang diputus vonis pidana mati oleh sidang pengadilan. Orang tersebut dapat mengajukan upaya hukum biasa berupa banding ke Pengadilan Tinggi yang berada di Ibukota Provinsi jika masih kurang berkenan dengan putusan Pengadilan Tinggi maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang berada di Ibukota Negara. Setelah ke Mahkamah Agung maka putusannya *Inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap). Dengan demikian setelah *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) dan menyatakan bahwa orang tersebut harus dipidana mati maka yang dapat dilakukan oleh orang yang divonis pidana mati tersebut adalah upaya hukum luar biasa yang bernama Peninjauan Kembali atau PK yang diajukan ke Mahkamah Agung yang berada di Ibukota Provinsi.

Setelah permohonan PK ditolak oleh MA maka dilaksanakanlah “Eksekusi Mati” yang melakukan adalah Jaksa Eksekutor yang mendapat surat perintah dari MA untuk melakukan eksekusi terhadap terpidana mati tersebut. Pelaksanaan tersebut

diatur dalam Undang-Undang No.20/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Dimana caranya dengan menembak mati dengan peluru satu kali.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung, dimana data primer dari penelitian ini adalah data dari hasil wawancara jaksa eksekutor terkait permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diantaranya adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku serta hasil penelitian yang berwujud laporan (Amirudin dan Askin, 2004). Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu metode analisis data yang berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, mendeskripsikan, menafsirkan dan mengintrepetasi data hasil lisan atau tulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan (Moleong, 2003). Dari bahan dan data yang diperoleh tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertimbangan Jaksa Eksekutor dalam Penundaan Eksekusi Mati Terkait Upaya Hukum Luar Biasa Ditinjau dari Nilai-Nilai Islami Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Karanganyar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Jaksa Eksekutor Terhadap Penundaan Eksekusi Hukuman Mati

Pertimbangan Jaksa Eksekutor dalam melaksanakan penundaan Eksekusi Hukum Mati terdapat dua (2) cara yaitu, *pertama* merupakan pemberian grasi dari Presiden dan yang *kedua* merupakan adanya upaya hukum luar biasa yang dinamakan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan narapidana kepada Mahkamah Agung (MA). Tetapi menurut Muhammad Adib Adam selaku Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar menyatakan bahwa : Pertimbangan jaksa eksekutor dalam melaksanakan penundaan eksekusi hukum mati tersebut terdapat dua (2) cara juga menurut dia yaitu adanya pemberian grasi yang mana harus menunggu persetujuan dari Presiden untuk dilakukan

eksekusi atau ditunda dan adanya upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan narapidana kepada Mahkamah Agung yang mana juga harus menunggu. Dimana tetapi Jaksa dalam melaksanakan eksekusi tersebut tidak pernah untuk menunda-nunda eksekusi dan dalam melaksanakan eksekusi tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3.2 Pertimbangan Jaksa Eksekutor dalam Perspektif Nilai-Nilai Islami Terhadap Penundaan Eksekusi Hukuman Mati

Pertimbangan jaksa eksekutor dalam perspektif nilai-nilai islami terhadap terpidana mati tidak lepas dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist serta hukum islam yang lainnya. Pertimbangan jaksa eksekutor dalam perspektif nilai-nilai islami juga didukung dari pendapat Muhammad Adib Adam selaku Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar yang mengemukakan, sebagai berikut : Pertimbangan jaksa eksekutor dalam perspektif nilai-nilai islami memang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum islam tersebut yang ada dalam Al-Quran dan Hadist serta hukum islam lainnya dimana harus dilakukan yang setara dengan apa yang telah dilakukannya, ini disebut qishash tetapi jika keluarga dari korban memaafkan pelaku tindak pidana maka harus membayar diat dimana dijelaskan dalam Al-quran Surah Al-Baqarah Ayat 178-179.

Namun dalam hal ini jaksa sendiri masih menggunakan hukum positif Indonesia yaitu undang-undang yang berlaku selama ini bukan menggunakan hukum islam. Maka dari itu pertimbangan jaksa eksekutor dalam perspektif nilai-nilai islami tidak sesuai dan tidak bisa dipakai di Indonesia karena Indonesia menggunakan hukum positif bukan hukum islam seperti negara Arab Saudi selama ini. Dalam kesepakatan semua ulama adanya hukuman mati bagi pelaku yang melakukan jarimah atau tindak pidana memiliki tujuan untuk menciptakan suatu kemaslahatan dan hal yang benar untuk hidup kepada manusia, baik individu serta bermasyarakat (Attamimi, 2010).

Selain pertimbangan jaksa eksekutor dalam persepektif nilai-nilai islami adalah harus sesuai dengan Al-Quran dan Hadist serta hukum islam lainnya. Nyatanya terdapat lagi pertimbangannya yaitu mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana apakah manusia tersebut sangat memahami atau cakap dalam hukum atau tidak yang disebut dengan mukallaf. Jika seseorang yang

melakukan suatu tindak pidana atau jarimah, tetapi dia dianggap tidak memahami atau cakap hukum maka dia tidak dapat mempertanggungjawabkan suatu pidananya atau jarimahnya, maka dia memperoleh kebebasan dari hukuman walaupun secara hukum seseorang tersebut terbukti melakukannya. Sementara itu suatu tindakan belum dianggap suatu tindak pidana atau jarimah jika seseorang yang melakukan tindak pidana atau meninggalkan tindak pidananya atau jarimahnya yang belum terdapat dalam nashnya yang jelas. Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan, jika seseorang yang melakukan tindak pidana atau jarimah atau meninggalkan tindak pidananya atau jarimahnya yang belum ada ketentuan atau nashnya yang jelas maka tidak dapat mempertanggungjawabkan secara hukum pidana atau dinyatakan bebas.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam hasil penelitian terhadap pertimbangan jaksa eksekutor dalam penundaan eksekusi hukuman mati secara pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Dimana dalam pertimbangan jaksa eksekutor dalam penundaan eksekusi hukuman mati terdapat 2 (dua) cara, cara tersebut adalah pemberian grasi dan peninjauan kembali (PK). Pemberian grasi yaitu suatu bentuk upaya hukum dimana pemberian suatu wewenang dari Presiden sebagai kepala negara yang memberikan pengampunan kepada narapidana yang telah diputus hakim untuk menghapuskan sebagian atau seluruhnya serta merubah sifat hukuman yang telah ia perbuat tersebut. Sementara itu peninjauan kembali (PK) yaitu suatu bentuk upaya hukum luar biasa dimana dilakukan setiap orang yang telah memiliki putusan dari hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap untuk melakukan suatu peninjauan kembali dari putusan tersebut, karena bisa saja terdapat bukti baru atau novum yang dahulu belum diketahui hakim sehingga kemungkinan putusan hakim tersebut menjadi berbeda. Aturan yang mengatur pemberian grasi terdapat dalam Pasal 1 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2002 sedangkan untuk peninjauan kembali (PK) terdapat dalam Pasal 21 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pemberian grasi dan peninjauan kembali (PK) terdapat alasan-alasan dan syarat-syarat dalam

mengajukan masing-masing yang sudah dijelaskan dalam BAB III hasil penelitian dan pembahasan.

Dalam hasil penelitian terhadap perspektif nilai-nilai islami terhadap terpidana mati sangat tidak bisa digunakan dalam negara Indonesia karena negara kita Indonesia sudah menerapkan hukum positif Indonesia yang kita kenal sekarang sangat berbeda jauh dengan hukum islam yang mana telah digunakan di negara Arab Saudi. Menurut pelaksanaannya juga sangat berbeda dimana dalam hukum positif Indonesia yang kita kenal tersebut terdapat dalam Pasal 10 KUHP sedangkan dalam hukum islam tersebut terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist yang sering disebut qishash. Dengan demikian sangat jauh berbeda sekali untuk digunakan di negara Indonesia walaupun negara Indonesia mayoritas beragama islam tetapi sangat tidak mungkin digunakan hukum islam tersebut karena negara kita sudah menggunakan hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum islam terdapat adanya hukuman mati dan hukum positif Indonesia terdapat juga adanya hukuman mati yang membedakan hanya terletak pada pelaksanaannya saja.

4.2 Saran

- 4.2.1 *Pertama*, kepada Jaksa, perlu memberikan suatu dakwaan yang adil kepada terpidana agar tidak menimbulkan ketidakadilan.
- 4.2.2 *Kedua*, kepada Jaksa dalam memberikan suatu pertimbangan harus memikirkan secara teliti agar dalam memberikan pertimbangannya sesuai dengan apa yang dipikirkan Jaksa tersebut.
- 4.2.3 *Ketiga*, kepada terpidana, harus menerima dengan ikhlas dan lahir batin terkait putusan yang mengancam pidana mati terhadapnya.
- 4.2.4 *Keempat*, kepada Jaksa yang beragama Islam, dalam melakukan eksekusi pidana mati terhadap terpidana seharusnya diimbangi dengan nilai-nilai Islam agar Jaksa dalam melakukan eksekusi mati sesuai dengan jalan Allah S.W.T .

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, kedua orang tua saya yang selalu mendo'akan, memberi semangat dan dukungan dalam pembuatan karya ilmiah ini. *Kedua*, keluarga besar

saya yang telah memberikan dukungan sepenuhnya. *Ketiga*, bapak Hartanto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah, yang telah memberikan nasehat dan saran agar penulisan ilmiah ini menjadi lebih baik. *Keempat*, teman yang selalu memberi doa, dukungan, semangat, dan saran dalam penulisan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin dan Askin, H. Zaenal. (2004). *Penghantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT.Raja Garfindo Persada.

Attamimi, Umar. (2010). *Lembaga Maaf Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Aynat Publishing.

Moleong, J. Lexi. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosyda Karya.

Thalib, M.. (2000). *Fiqih Jinayah*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Moeljatno. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soesilo, R. (2000). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor : Politea.